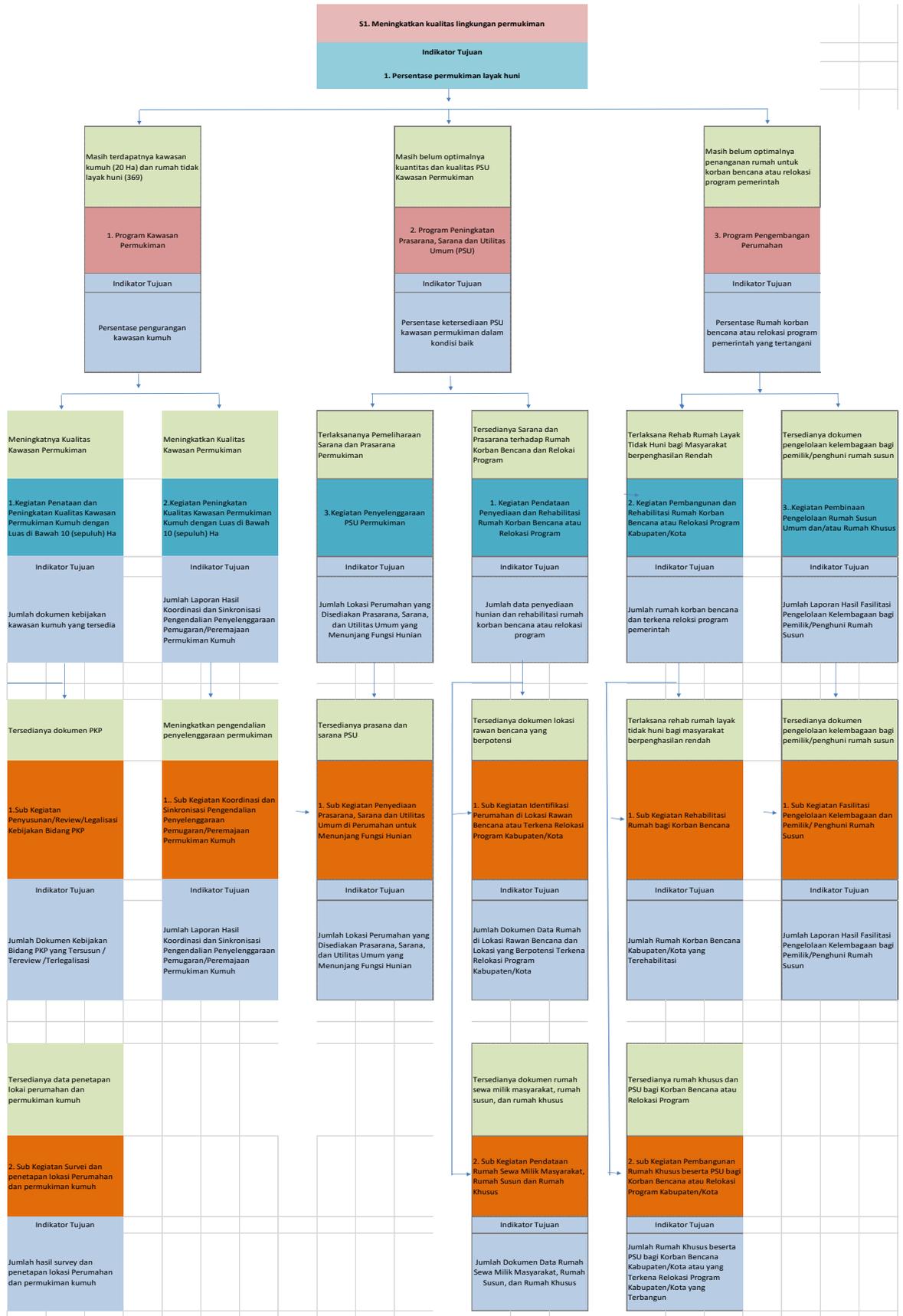


## Cascading Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026





Belum optimalnya kualitas layanan infrastruktur dan lingkungan hidup
T2. Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
<b>Indikator Tujuan</b> 1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

S2. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
<b>Indikator Tujuan</b> 1. Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan

Terdapatnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Belum Optimalnya pelayanan kepada masyarakat terhadap pengaduan PPLH	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap Pengakuan Keberadaan Hukum Adat (MHA) dan Lokal serta Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Pengakuan Keberadaan Hukum Adat (MHA) dan Lokal serta Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Pengakuan Keberadaan Hukum Adat (MHA) dan Lokal serta Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Meningkatnya Upaya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan Hayati dan Eko Sistem di Padang Panjang	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Limbah B3	Meningkatnya kebersihan kota		
1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	2. Program Penanganan Pengaduan	3. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap tinjauan lingkungan dan tinjauan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	4. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	4. Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	6. Program Pengurangan Pengeluaran Limbah Hidup untuk Masyarakat	7. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	8. Program Pengelolaan Kelembagaan Hayati (KEHAT)	9. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (BB3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	10. Program Pengelolaan Sampah	10. Program Pengelolaan Sampah		
Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan		
Persentase dokumen perencanaan lingkungan	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tanggapi	Persentase ketataan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	Persentase MHA yang mendapat pendampingan terkait PPLH	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah jenis pengurangan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase kegiatan pencegahan dan penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase luas RTH Publik	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Perizinan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Persentase pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah		
Terdapatnya dokumen KHS BPKD	Terdapatnya dokumen PPLH	Meningkatkan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha/kegiatan terhadap tinjauan PPLH	Terdapatnya Laporan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengakuan Tradisional dan Hak MHA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terdapatnya Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terseleenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah	Meningkatkan Upaya Pencegahan, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terdapatnya Laporan data Pengumpulan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan Hayati Kabupaten/ Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	Terdapatnya Laporan pengumpul Limbah B3 yang dibina /diverifikasi lapangan	Peningkatan dan pengelolaan kebersihan kota	Peningkatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan persampahan
3. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Penyelidikan Pengaduan Masyarakat di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang tinjauan lingkungan dan tinjauan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	1. Kegiatan Penguatan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3. Kegiatan Pemberian Pengurangan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Hayati Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2. Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	1. Kegiatan Pengelolaan Sampah	2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diorganisir oleh Pihak Swasta
Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Tujuan
Jumlah dokumen KHS yang disusun	Jumlah dokumen penyelidikan pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH yang Diakibatkan Pemberdayaan, Kemahiran, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)	Jumlah jenis Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Plattopphi yang Dinilai Kinerja	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan	Jumlah jenis penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	Jumlah lokasi RTH Publik yang dikelola	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	Jumlah pengumpul Limbah B3 yang dibina /diverifikasi lapangan	Persentase penanganan sampah	Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi





Meningkatnya rumah layak huni

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Tujuan

Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha



Meningkatnya rumah layak huni

1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 Ha

Indikator Tujuan

Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha